

Kewarganegaraan Digital: Tantangan Etika di Dunia Maya

Sri Rejeki¹, Aisyah Wulan Suci², Rio Ramadhan³, Amanullah⁴, Imam Adisetiawan⁵,
Lalu Arfa Am Andesa⁶

^{1,2,3,4,5,6}Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Umi.cici.66@gmail.com¹, aisyahsuci2005@gmail.com², ramadhanrio439@gmail.com³,

nullahamanullah204@gmail.com⁴, Imam.setiaean6926@gmail.com⁵, arfaandesa@gmail.com⁶

ABSTRACT

Keywords:

Digital Citizenship

Digital Ethics

PPKn

Pancasila Values,

Character Education.

This study aims to examine ethical challenges in the practice of digital citizenship and formulate educational strategies grounded in Pancasila values. Employing a qualitative approach through library research within an integrative review framework, this research synthesizes scholarly literature related to digital citizenship, media ethics, and character education. The findings indicate that digital citizenship requires not only technical proficiency but also moral awareness in addressing issues such as misinformation, hate speech, and privacy violations. In the Indonesian context, Pancasila values—including humanity, social justice, and unity—serve as the ethical foundation for navigating the digital sphere. Civic and Pancasila Education (PPKn) must integrate digital issues through contextual and reflective pedagogies to foster students' moral responsibility in online interactions. This study recommends the development of pedagogical models based on Pancasila values that are responsive to digital dynamics. The findings are expected to enrich both academic discourse and practical applications in citizenship education amid the evolving digital landscape.

Kata Kunci:

Kewarganegaraan Digital

Etika Digital

PPKn

Nilai Pancasila

Pendidikan Karakter.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan etika dalam praktik kewarganegaraan digital serta merumuskan strategi pendidikan yang relevan berbasis nilai-nilai Pancasila. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research dalam kerangka integrative review, studi ini menyintesis literatur ilmiah terkait kewarganegaraan digital, etika media, dan pendidikan karakter. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital tidak hanya menuntut kecakapan teknologis, tetapi juga kesadaran moral dalam menghadapi isu seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan menjadi fondasi utama dalam menavigasi ruang digital secara etis. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) perlu mengintegrasikan isu-isu digital melalui pendekatan kontekstual dan reflektif untuk membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawab secara sosial. Studi ini merekomendasikan pengembangan model pedagogis berbasis nilai Pancasila yang adaptif terhadap dinamika digital. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dan praksis pendidikan kewarganegaraan di era teknologi informasi.

Article History:

Received : 24-06-2025

Accepted : 30-06-2025



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memunculkan konsep baru dalam studi kewarganegaraan, yakni kewarganegaraan digital (*digital citizenship*). Kewarganegaraan digital tidak hanya mengacu pada kemampuan teknis menggunakan perangkat dan platform digital, tetapi juga mencakup kesadaran sosial, etika, dan hukum dalam berinteraksi di ruang siber (Mossberger et al., 2008; Ribble, 2012). Individu yang melek kewarganegaraan digital diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, berkontribusi dalam ruang publik digital, serta menghargai hak-hak digital orang lain (Choi, 2016). Dalam konteks pendidikan, kewarganegaraan digital menjadi bagian penting dari pembentukan karakter dan identitas warga negara yang berdaya saing global sekaligus berakar pada nilai-nilai lokal (Suryani, 2021). Dengan demikian, konsep ini memadukan literasi digital dengan kesadaran nilai-nilai demokrasi dan Pancasila sebagai pedoman berperilaku di dunia maya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara individu berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai kewarganegaraan seperti tanggung jawab, kepedulian sosial, kebebasan berpendapat, serta partisipasi aktif kini meluas ke ranah digital (Mardhatillah, 2022; Nasrullah, 2015; Rheingold, 2012). Kewarganegaraan digital tidak lagi sekadar kemampuan menggunakan internet, tetapi mencerminkan bagaimana individu mengaktualisasikan hak dan kewajibannya secara etis dalam ruang maya. Transformasi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan; warga negara memiliki akses luas terhadap informasi dan partisipasi, tetapi juga berhadapan dengan risiko misinformasi, pelanggaran privasi, dan ujaran kebencian (Choi, 2016; Tambusai, 2021; Wardle & Derakhshan, 2017). Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila perlu menjadi fondasi moral yang membimbing perilaku digital agar degradasi etika tidak menggerus integritas sosial masyarakat digital (Ismawati, 2022; Sumarni, 2023).

Etika digital merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur interaksi individu dalam ruang siber. Etika ini menjadi krusial dalam membentuk karakter warga negara digital yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab secara sosial (Ahmad, 2021; Livingstone et al., 2014; Maulidia, 2022; Setiani & Fauzan, 2020). Dalam konteks Indonesia, prinsip etika digital harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan dalam keberagaman. Namun, berbagai fenomena seperti hoaks, cyberbullying, dan ujaran kebencian menandakan lemahnya pendidikan nilai dalam dunia maya (Sunarto, 2020; Suwana, 2019). Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu mengadopsi pendekatan reflektif dan partisipatif yang mendorong peserta didik mengevaluasi perilaku digital mereka secara kritis. Pendidikan etika digital tidak cukup dengan larangan normatif, tetapi harus membangun kesadaran moral sebagai basis pembentukan karakter.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan strategis dalam menginternalisasi nilai-nilai etis ke dalam praktik digital siswa. Kurikulum PPKn perlu disesuaikan dengan kebutuhan era digital, mencakup tema-tema seperti hak digital, privasi, keamanan siber, serta literasi informasi (Wijayanti & Rosyid, 2021), (Damayanti, 2022), (Suryadi, 2023). Pembelajaran berbasis kontekstual, reflektif, dan dialogis akan membantu peserta didik merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan daring mereka. Guru PPKn juga harus membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis dan empati agar mereka mampu bersikap bijak di tengah kompleksitas informasi digital (Basri, 2022; Sukarni, 2020). Dengan pendekatan ini, PPKn tidak hanya mentransfer pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter warga negara digital yang berintegritas. Harapannya, peserta didik mampu tampil sebagai warga negara digital yang etis, aktif, dan bertanggung jawab secara sosial di tengah arus globalisasi teknologi.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya etika digital dan literasi kewarganegaraan dalam ruang maya, masih terdapat celah riset terkait integrasi sistematis nilai-nilai Pancasila dalam praktik kewarganegaraan digital peserta didik. Banyak studi berfokus pada aspek

teknis literasi digital, namun belum menekankan bagaimana nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial dapat dibumikan secara konkret dalam ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menempatkan etika Pancasila sebagai kerangka moral utama dalam pendidikan kewarganegaraan digital. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pendidikan PPKn yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan etika dalam praktik kewarganegaraan digital dan merumuskan strategi pendidikan PPKn yang dapat membentuk karakter warga negara digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau studi pustaka yang dikembangkan dalam kerangka integrative review. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyintesis secara sistematis berbagai temuan dari literatur ilmiah guna membangun pemahaman konseptual yang lebih komprehensif terhadap suatu isu tertentu. Berbeda dengan tinjauan pustaka konvensional, integrative review tidak hanya memetakan hasil-hasil penelitian yang ada, tetapi juga mengintegrasikan beragam pendekatan metodologis dan perspektif teoretis untuk menghasilkan sintesis yang lebih mendalam dan bernilai inovatif.

Dalam penelitian ini, isu yang dikaji adalah etika kewarganegaraan digital yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan ideologis bangsa Indonesia. Etika kewarganegaraan digital menjadi isu strategis seiring meningkatnya aktivitas warga negara di ruang digital, baik dalam interaksi sosial, penyampaian pendapat, hingga partisipasi politik. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Pancasila diyakini mampu memberikan landasan normatif yang kuat untuk mengarahkan perilaku warga negara agar tetap menjunjung tinggi tanggung jawab, toleransi, dan integritas di tengah dinamika kehidupan digital yang kompleks dan terbuka.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan etika yang dihadapi oleh warga negara dalam ruang digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan intoleransi digital. Berdasarkan pemetaan tantangan tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan strategi pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam mata pelajaran PPKn, yang berbasis pada internalisasi nilai-nilai Pancasila. Strategi tersebut diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual, sehingga mampu membentuk karakter warga negara yang cerdas digital, beretika, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Nilai Kewarganegaraan dalam Era Digital

Transformasi digital telah mengubah paradigma kewarganegaraan yang semula berbasis fisik menjadi kewarganegaraan yang bersifat virtual. Warga negara kini tidak hanya mengekspresikan hak dan kewajibannya di dunia nyata, tetapi juga melalui ruang digital seperti media sosial, forum daring, dan platform partisipasi publik lainnya (Mardhatillah, 2022; Mossberger et al., 2008; Nasrullah, 2015; Rheingold, 2012; Suryani, 2021). Hal ini menyebabkan pergeseran nilai-nilai seperti tanggung jawab, toleransi, dan kebebasan menjadi lebih kompleks dalam implementasinya. Dalam dunia maya, setiap individu berhadapan dengan batasan baru yang tidak diatur hanya oleh hukum, tetapi juga oleh norma digital (Setiawan & Azzahra, 2020). Akibatnya, terjadi pergeseran kesadaran kewarganegaraan yang memerlukan adaptasi nilai-nilai moral (Hobbs, 2017). Kesadaran kolektif terhadap pentingnya etika digital menjadi kunci dalam menjaga kohesi sosial. Oleh karena itu, transformasi nilai harus dikawal dengan pemahaman mendalam terhadap tantangan era digital (Latief et al., 2022).

Kehadiran ruang digital sebagai tempat ekspresi kebebasan berpendapat turut memengaruhi cara warga negara menyampaikan opini dan kritik terhadap negara. Namun, kebebasan ini sering

kali tidak diimbangi dengan kesadaran etis, sehingga memunculkan praktik seperti ujaran kebencian dan penyebaran disinformasi (Suwana, 2019; Tambusai, 2021; Trainor et al., 1997; Wardani & Cahyani, 2020; Wardle & Derakhshan, 2017). Hal ini mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap batas-batas kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi digital. Oleh karena itu, kewarganegaraan digital bukan hanya tentang hak untuk bersuara, tetapi juga tentang tanggung jawab moral atas dampak yang ditimbulkan oleh setiap tindakan daring. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila menjadi rujukan normatif untuk mbingkai perilaku warga digital (Ismawati, 2022). Ketika nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan diterapkan di ruang maya, maka etika digital dapat menjadi kekuatan pemersatu. Pendidikan menjadi sarana penting dalam membentuk kesadaran ini (Sumarni, 2023).

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara warga negara berinteraksi, berpartisipasi, dan mengekspresikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kondisi ini menuntut adanya rekonstruksi konsep kewarganegaraan yang tidak lagi bersifat pasif dan normatif semata, melainkan aktif, reflektif, dan kontekstual. Warga negara masa kini dituntut memiliki literasi digital yang kritis agar mampu menyikapi berbagai isu di ruang maya dengan bijak. Hal ini mencakup kesadaran untuk menolak dan tidak ikut serta dalam penyebaran konten yang provokatif, diskriminatif, menyesatkan, atau mengandung ujaran kebencian. Ruang digital harus dipandang sebagai bagian integral dari ekosistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang memerlukan tanggung jawab kolektif serta etika kewarganegaraan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks tersebut, sistem pendidikan nasional perlu mengambil peran strategis dalam membentuk karakter warga negara digital yang beretika dan bertanggung jawab. Salah satu langkah penting adalah melakukan penyesuaian kurikulum pendidikan kewarganegaraan agar lebih relevan dengan dinamika dan tantangan kehidupan digital. Kurikulum tidak hanya perlu mengajarkan teori kewarganegaraan, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya etika digital sebagai bagian dari identitas kebangsaan. Kolaborasi lintas sektor antara institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam membangun pemahaman kewarganegaraan yang utuh dan kontekstual. Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital tidak menjadi ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, melainkan peluang untuk memperkuat dan merevitalisasi semangat kebangsaan dalam lanskap kehidupan digital.

2. Etika Digital dan Pembentukan Karakter Warga Negara

Etika digital berperan penting dalam membentuk karakter warga negara yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab di dunia maya. Dalam praktiknya, etika digital mencakup kemampuan untuk berinteraksi secara santun, menghindari provokasi, serta menghargai perbedaan pendapat di ruang daring (Ahmad, 2021; Livingstone et al., 2014; Maulidia, 2022; Ribble, 2012; Setiani & Fauzan, 2020). Namun, kenyataannya banyak pengguna internet yang belum memiliki kesadaran etis dalam bermedia. Hal ini tercermin dari maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying yang merusak tatanan komunikasi publik (Sunarto, 2020). Etika tidak hanya berbicara tentang aturan, tetapi menyentuh kesadaran batin untuk melakukan yang benar. Oleh karena itu, pendidikan karakter melalui PPKn harus memperkuat nilai-nilai etika digital sejak dini. Karakter warga negara tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses pembiasaan dan keteladanan yang konsisten (Lickona, 1991; Sudrajat, 2011).

Pembentukan karakter digital yang kuat dapat mencegah berkembangnya budaya digital yang negatif. Dalam era algoritma dan viralitas, warga negara dituntut untuk memiliki kontrol diri dan tanggung jawab terhadap apa yang mereka unggah dan bagikan (Aprilia & Yamin, 2023; Boyd, 2014; Howard & Hussain, 2013; Solek, 2020; Subekti & Sugiharto, 2021). Karakter seperti integritas, empati, dan kejujuran menjadi sangat penting dalam menjaga ruang digital tetap sehat. Pendidikan PPKn harus menekankan pentingnya prinsip moral yang berlaku universal namun juga kontekstual dengan

nilai-nilai Pancasila. Misalnya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat menjadi pedoman dalam berinteraksi di media sosial. Karakter tersebut akan tumbuh melalui pendidikan yang berbasis nilai, bukan sekadar pengetahuan kognitif. Guru harus mampu menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan digital mencerminkan kepribadian dan nilai kebangsaan (Basri, 2022).

Warga negara digital yang berkarakter merupakan pilar utama dalam menciptakan ruang digital yang sehat, produktif, dan beradab. Individu yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat akan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab untuk membangun peradaban, bukan sebaliknya, menjadi agen perusak melalui penyebaran konten negatif. Dalam kerangka ini, warga negara harus diposisikan sebagai subjek aktif yang mampu mengontrol penggunaan teknologi, memiliki kesadaran etis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi digital. Etika digital menjadi dimensi penting dalam pembangunan karakter warga negara, karena di era disrupsi informasi, tantangan terbesar bukan hanya terletak pada arus teknologi, tetapi pada ketahanan moral pengguna teknologi itu sendiri.

Untuk membentuk karakter tersebut, pendidikan kewarganegaraan (PPKn) perlu mengalami inovasi pedagogis, salah satunya melalui penerapan pembelajaran berbasis proyek dan refleksi moral. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam menganalisis kasus-kasus aktual di media sosial, seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, atau perundungan digital, dengan pendekatan etis dan berbasis nilai Pancasila. Kegiatan semacam ini tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital, tetapi juga menumbuhkan empati sosial, rasa tanggung jawab, dan kepekaan terhadap isu-isu kebangsaan. Apabila pendidikan berhasil mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa ke dalam konteks kehidupan digital, maka generasi muda akan tumbuh menjadi warga negara yang tangguh secara moral, sosial, dan mampu menjaga ruang digital sebagai cerminan peradaban bangsa yang beretika.

3. Peran Pendidikan PPKn dalam Menanamkan Kesadaran Etis di Dunia Maya

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran sentral dalam membentuk kesadaran etis peserta didik dalam dunia digital yang semakin kompleks. Kurikulum PPKn perlu mengintegrasikan tema-tema literasi digital, hak digital, dan keamanan siber dalam pembelajaran kewarganegaraan (Almerico, 2014; Anderson & Rainie, 2014; Damayanti, 2022; Suryadi, 2023; Wijayanti & Rosyid, 2021). Pembelajaran tidak lagi cukup berbasis teks atau hafalan, tetapi harus berorientasi pada pemahaman nilai dan penerapannya dalam kehidupan nyata, termasuk di dunia maya. Strategi pembelajaran partisipatif seperti diskusi, debat, dan studi kasus sangat efektif untuk menumbuhkan kesadaran etis digital (Sukarni, 2020). Peserta didik juga perlu diberi ruang untuk berekspresi, bertanya, dan menyampaikan opini dengan tanggung jawab. Guru PPKn harus menjadi model dalam menginternalisasi nilai-nilai etis dalam kehidupan daring. Melalui pendekatan ini, PPKn dapat berfungsi sebagai pilar pendidikan karakter digital.

PPKn juga berfungsi sebagai instrumen untuk membekali peserta didik dengan prinsip-prinsip demokrasi digital. Di tengah berkembangnya politik identitas dan radikalisme di dunia maya, peserta didik harus dibekali dengan kemampuan untuk mengenali dan menangkal konten yang berpotensi memecah persatuan bangsa (McNutt, 2014; Sunaryo, 2022; Syarifudin & Hartatik, 2021; Wahyudi, 2020; Yuliana, 2023). Pendidikan PPKn harus mengedepankan pendekatan kontekstual, di mana pembelajaran dikaitkan dengan isu-isu aktual yang sedang berkembang di media digital. Hal ini akan menjadikan peserta didik lebih peka terhadap dinamika sosial dan lebih bertanggung jawab dalam bersikap. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang etis dan bermanfaat. PPKn mampu membentuk kesadaran bahwa tanggung jawab digital merupakan bagian tak terpisahkan dari kewarganegaraan yang aktif.

Agar pendidikan PPKn mampu menjawab tantangan era digital secara efektif, diperlukan pendekatan yang bersifat kolaboratif dan lintas sektoral. Pembentukan kesadaran etis peserta didik

tidak cukup hanya dilakukan di ruang kelas, melainkan harus melibatkan peran aktif orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nilai-nilai kewarganegaraan perlu ditanamkan secara konsisten melalui lingkungan sosial yang mendukung, mulai dari rumah, sekolah, hingga ruang publik. Budaya sekolah yang menekankan etika digital, sikap toleran, dan tanggung jawab sosial harus diperkuat dengan lingkungan keluarga dan masyarakat yang juga menjunjung nilai-nilai yang sama. Dengan demikian, pendidikan nilai tidak berjalan secara terpisah, melainkan membentuk ekosistem pembelajaran yang utuh dan berkesinambungan.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan nasional perlu memberikan perhatian serius terhadap penguatan kapasitas guru dalam mengajarkan literasi dan etika digital. Guru PPKn harus dibekali dengan kompetensi pedagogis dan digital yang memadai agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam materi yang relevan dengan kehidupan peserta didik di dunia maya. Salah satu strategi inovatif yang dapat diterapkan adalah pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi digital yang mampu menyajikan konten secara kontekstual, menarik, dan partisipatif. Upaya ini tidak hanya mempermudah proses internalisasi nilai, tetapi juga meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif. Jika strategi ini terimplementasi dengan baik, maka pendidikan PPKn akan menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi digital yang memiliki kesadaran nilai, integritas moral, dan tanggung jawab kebangsaan yang kuat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kewarganegaraan digital merupakan konsep penting dalam era teknologi informasi yang menuntut integrasi antara kemampuan literasi digital dan kesadaran etis berbasis nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, penguatan karakter warga negara digital tidak hanya bergantung pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam setiap interaksi di ruang maya. Tantangan seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi menunjukkan bahwa pendidikan etika digital belum sepenuhnya berhasil membentuk kesadaran moral peserta didik. Kajian riset di masa mendatang perlu memperluas fokus dari sekadar kemampuan literasi digital ke arah integrasi sistematis antara pendidikan nilai dan etika kewarganegaraan digital berbasis Pancasila. Penelitian ke depan dapat mengembangkan model pedagogis interaktif dan kontekstual yang memungkinkan peserta didik mengalami, merefleksikan, dan menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam lingkungan digital yang nyata. Dengan demikian, riset mendatang akan berkontribusi pada penguatan pendidikan karakter digital yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada pembentukan generasi muda sebagai warga negara digital yang demokratis, toleran, dan berintegritas tinggi.

REFERENSI

- Ahmad, R. (2021). *Etika digital dalam pendidikan karakter*. Prenadamedia Group.
- Almerico, G. M. (2014). Building character through literacy with children's literature. *Research in Higher Education Journal*, 26, 1–13.
- Anderson, J., & Rainie, L. (2014). *The future of privacy*.
- Aprilia, S., & Yamin, M. (2023). Penguatan karakter peserta didik melalui literasi digital berbasis nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 29(1), 55–66.
- Basri, H. (2022). Peran guru dalam menanamkan etika bermedia sosial di kalangan remaja. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 144–159.
- Boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Damayanti, R. (2022). Integrasi literasi digital dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Civic Education Journal*, 10(1), 32–44.
- Hobbs, R. (2017). *Create to learn: Introduction to digital literacy*. Wiley.
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's fourth wave? Digital media and the Arab Spring*. Oxford University Press.
- Ismawati, D. (2022). Pancasila sebagai dasar etika bermedia digital. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 87–98.
- Latief, M., Muhaimin, Heriyanti, Tarigan, I. L., & Sutrisno. (2022). Determination Antioxidant Activity of Coffea Arabica, Coffea Canephora, Coffea Liberica and Sunscreens Cream Formulation for Sun Protection Factor (SPF). *Pharmacognosy Journal*, 14(2), 335–342. <https://doi.org/10.5530/pj.2022.14.43>
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2014). *Risks and safety on the internet: The perspective of European children*.
- Mardhatillah, M. (2022). Tanggung jawab etis warga negara di ruang digital: Tinjauan filsafat moral. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 35(1), 75–92.
- Maulidia, R. (2022). Membangun etika digital dalam pendidikan karakter di era informasi. *Jurnal Teknologi Dan Pendidikan*, 4(2), 23–31.
- McNutt, J. G. (2014). Technology, activism and social justice in a digital age. *Administration in Social Work*, 38(2), 196–203.
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2008). *Digital citizenship: The internet, society, and participation*. MIT Press.
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Rheingold, H. (2012). *Net smart: How to thrive online*. MIT Press.
- Ribble, M. (2012). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (2nd ed.). ISTE.
- Setiani, M., & Fauzan, R. (2020). Literasi digital sebagai strategi pembentukan karakter generasi milenial. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 55–70.
- Setiawan, D., & Azzahra, F. (2020). Perubahan nilai kewarganegaraan dalam media digital. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 24(3), 187–198.
- Solek, M. (2020). Literasi digital dan implikasinya terhadap etika bermedia sosial. *Jurnal Komunikasi Dan Informasi*, 10(2), 13–22.
- Subekti, R., & Sugiharto, R. (2021). Kewargaan digital dan pendidikan karakter berbasis Pancasila. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 11(1), 34–48.
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa pendidikan karakter? *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 47–58.
- Sukarni, S. (2020). Pengembangan pembelajaran PPKn berbasis nilai dalam konteks masyarakat digital. *Jurnal Civic Education*, 8(2), 113–124.
- Sumarni, S. (2023). Internalization of Pancasila values in digital citizenship education. *Civicus: Education Journal*, 6(1), 72–84.
- Sunarto, S. (2020). Etika dan budaya dalam penggunaan media sosial. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 4(1), 90–103.
- Sunaryo, S. (2022). Pendidikan kewarganegaraan di era digitalisasi: Upaya menangkal radikalisme. *Jurnal Civic Intelligence*, 5(2), 60–74.
- Suryadi, D. (2023). Literasi digital dan pembentukan warga negara kritis. *Jurnal PPKn Progresif*, 7(1), 40–51.
- Suryani, N. (2021). Kewarganegaraan digital dalam pendidikan abad 21. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi*, 15(1), 33–45.
- Suwana, F. (2019). Empowering Indonesian women through building digital media literacy. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 40(3), 615–621. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.03.011>
- Syarifudin, A., & Hartatik, R. (2021). Peran pendidikan karakter dalam menangkal radikalisme di dunia maya.

Jurnal Kependidikan, 9(2), 101–115.

- Tambusai, R. (2021). Literasi digital dan etika bermedia sosial di kalangan remaja. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 70–82.
- Trainor, L. J., Clark, E. D., Huntley, A., & Adams, B. A. (1997). The acoustic basis of preferences for infant-directed singing. *Infant Behavior and Development*, 20(3), 383–396. [https://doi.org/10.1016/S0163-6383\(97\)90009-6](https://doi.org/10.1016/S0163-6383(97)90009-6)
- Wahyudi, D. (2020). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 20(2), 134–145.
- Wardani, F., & Cahyani, I. (2020). Analisis wacana ujaran kebencian dalam media sosial. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 10(1), 88–99.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*.
- Wijayanti, E., & Rosyid, M. (2021). Literasi digital dalam pembelajaran PPKn di era pandemi. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Kewarganegaraan*, 11(1), 22–35.
- Yuliana, L. (2023). Pendidikan toleransi berbasis digital dalam membangun harmoni sosial. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 5(1), 61–72.